

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi Kebijakan

Kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud tertentu, selanjutnya kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut Jones dalam Suharto dan Edi (1991). Kemudian menurut Nawawi (2009) “Kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”. Ditambahkan Suharto (Nawawi, 2009) Kebijakan berasal dari kata bahasa Inggris “policy” yang dibedakan dengan kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Kebijaksanaan suatu kearifan pimpinan kepada bawahannya atau masyarakat, pimpinan yang arif dapat saja pengecualian aturan yang baku, kepada seseorang atau kelompok orang. Kemudian secara rinci komponen kebijakan dibedakan menjadi enam (6) komponen menurut Eulau dan Prewit (Nawawi, 2009) misalnya :

- a. Niat (intentions), tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan
- b. Tujuan (Goals), keadaan akhir yang hendak dicapai
- c. Rencana atau usulan (plans or proposals) , cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
- d. Program, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan
- e. Keputusan atau pilihan (decisions or choice), tindakan – tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan evaluasi program
- f. Pengaruh (effects), dampak program yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder.

2. Jenis Kebijakan

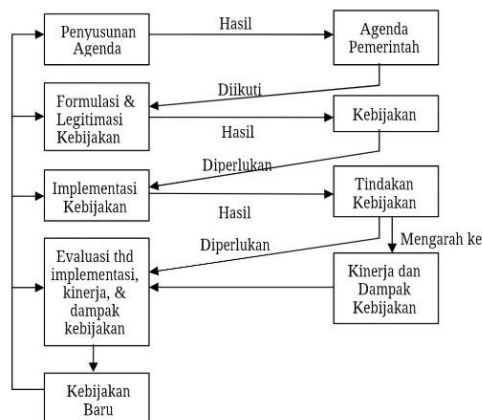
Menurut Anderson (2014) ada dua belas macam jenis kebijakan yakni :

- a. Substantive Policies, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subject matter kebijakan.
- b. Procedural Policies, yaitu menyangkut siapa, kelompok, mana dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
- c. Distributive policies. Kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau kelompok masyarakat
- d. Redistributive Policies. Kebijakan yang memindahkan hak, pemilihan atau kepunyaan pada masyarakat
- e. Regulatory Policies. Kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang
- f. Sekf Regulatory Policies. Kebijakan ini hamper sama dengan regulatory policies, hanya bedanya kebijakan ini didukung oleh seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan dengan kebijakan tersebut
- g. Material Policies. Kebijakan ini yang berkaitan dengan sumber material kepada penerimanya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikan
- h. Symbolic policies. Kebijakan ini tidak memaksa kepada khayalak karena dilaksanakan tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya
- i. Collective Good Policies. Kebijakan tentang barang–barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak
- j. Private Good Policies. Kebijakan menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat atau publik yang membutuhkan
- k. Liberal policies. Kebijakan ini yang menuntun kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan
- l. Conservative policies. Kebijakan ini adalah kebalikan dari kebijakan liberal

3. Proses Kebijakan

Menurut Ripley, dkk (1986) “tahapan kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dan kinerja dampak dan kebijakan baru”.

Gambar 1
Tahapan Kebijakan



Sumber : Ripley , 1985 (Nawawi, 2009)

4. Naskah Kebijakan (*Policy paper*)

Menurut Young dan Quinn dalam bukunya (2002) mengatakan bahwa:

The purpose of the policy paper is: to provide a comprehensive and persuasive argument justifying the policy recommendations presented in the paper and therefore, to act as a decision-making tool and a call to action for the target audience” dengan kata lain.

Policy paper adalah pemberian argument yang komprehensif guna memberikan rekomendasi kebijakan berbentuk makalah dan berfungsi sebagai alat untuk ajakan bertindak. Selanjutnya lebih lanjut di jelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari *policy paper* maka perlu melakukan beberapa pendekatan yaitu :

- mendefinisikan dan merinci masalah kebijakan yang mendesak dalam kerangka kebijakan saat ini
- menguraikan kemungkinan cara (alternatif kebijakan) di mana masalah ini dapat ditujukan
- memberikan evaluasi kemungkinan hasil dari opsi ini berdasarkan kerangka analisis yang diuraikan dan bukti dari kebijakan saat ini kerangka
- memilih alternatif yang disukai (rekomendasi kebijakan) dan memberikan argumen untuk menetapkan mengapa pilihan Anda adalah pilihan kebijakan terbaik.

Kemudian perbedaan antara *policy brief* dan *policy paper* di paparkan secara lengkap melalui gambar berikut :

Gambar 1
Perbedaan *Policy Paper* dan *Policy Brief*

Areas of Difference	Type of Policy Paper	
	Policy Study	Policy Analysis
<i>Audience</i>	Targets other policy specialists	Targets decision-makers
<i>Focus</i>	Issue-driven: General recommendations and information on policy issues	Client-driven: Designing specific policies to be implemented on the ground
<i>Methodology</i>	Can include much primary research	Rarely includes primary research
<i>Ideas/Language used</i>	Can be quite discipline specific/technical	Must be very clear and simple
<i>Length</i>	Up to 20,000 words	Not usually longer than 5,000 words

Sumber : Young and Quinn (2002).

Kemudian di dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Analisis Kebijakan Kertas kerja kebijakan adalah tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan”.

5. Kaidah Penulisan Karya Tulis Ilmiah Policy Paper

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Analisis Kebijakan, Analisis Kebijakan dalam menulis KTI perlu memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulis KTI harus memahami cara penulisan yang baik dengan struktur bahasa penulisan dan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan kaidah dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
- b. Ditulis menggunakan kalimat yang lugas, agar mudah dipahami pembaca. Analisis Kebijakan sebagai penulis KTI harus memahami bahwa pembaca KTI memiliki keterbatasan waktu untuk memahami isi semua tulisan. Oleh sebab itu, narasi dalam penulisan KTI harus dituangkan secara singkat, jelas, dan tegas;
- c. Argumentasi analisis meyakinkan.

KTI merupakan buah hasil pemikiran atau penelitian yang mengandung penjelasan, pembuktian dan pencerahan tentang suatu pokok bahasan dalam bidang ilmu tertentu. Atas dasar tersebut, maka diperlukan argumentasi sebagai penyampaian logis secara formal tentang suatu pendapat, pernyataan, posisi, atau cara pandang tertentu yang berkaitan dengan suatu isu dan masalah publik yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Argumentasi yang dibangun oleh penulis harus dapat memperkuat sisi penting/urgensi dari isu dan masalah kebijakan publik yang diangkat atau mendapat perhatian banyak pihak, khususnya pembuat kebijakan. KTI yang baik memiliki karakter argumen yang bersifat persuasif dan mengandung unsur kebaruan. Kekuatan persuasi sebuah argumen terletak pada kemampuan pemilihan kosakata atau penggunaan istilah-istilah oleh penulis. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan atau seni merajut perangkat rasional, emosional, dan gaya tertentu untuk meyakinkan pembaca.

- d. Memiliki data dukung yang baik Argumentasi yang baik memerlukan data dukung atau bukti yang kuat (robust evidences). Keberadaan bukti juga menjadi pembeda argumen akademik dengan argumen pada umumnya. Bukti-bukti dapat berupa data, informasi, hasil penelitian, statistik, survey, interview, maupun opini ahli (expert judgment) tentang informasi tertentu. Bukti yang baik setidaknya memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu relevan, reliabel, representatif, dan cukup. Relevan berarti bukti tersebut dalam konteks yang tepat dan mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan yang dibahas. Bukti harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui kebenarannya (reliable). Tulisan di blog atau Wikipedia misalnya, tidak termasuk bukti yang reliabel untuk menjadi referensi. Representatif berarti bukti mampu memperjelas gambaran dari sebuah permasalahan atau memperkuat argumentasi atau justifikasi yang dibangun dalam analisis. Bukti dianggap cukup apabila telah sesuai dengan kebutuhan.
- e. Disajikan dalam tampilan (layout) yang menarik. Penyajian data-data dan informasi dalam analisis menggunakan ilustrasi atau infografis. Penulis KTI perlu memperhatikan penggunaan ilustrasi atau infografis tersebut, karena tujuannya adalah mempermudah pembaca untuk menangkap pokok-pokok pikiran penulis. Penyajian data dan informasi dalam ilustrasi atau infografis juga dapat lebih mengefisienkan volume tulisan Sistematika.

6. Sistematika Penulisan Policy Paper

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Analisis

Kebijakan Sistematika penulisan policy paper setidaknya memuat komponen sebagai berikut:

- a. Ringkasan eksekutif (executive summary) Umumnya ditulis dalam 500 (lima ratus) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kata tanpa ada kutipan atau catatan kaki.
- b. Pendahuluan Merupakan panduan bagi para pembaca policy paper sehingga pembaca memahami apa yang menjadi permasalahan, tujuan serta pemecahan masalahnya. Pada bab ini ditulis dalam 500 (lima ratus) sampai dengan 1250 (seribu dua ratus lima puluh) kata.
- c. Latar belakang dari kebijakan Merupakan deskripsi masalah yang akan dicari pemecahannya, kekuatan yang bisa dijadikan untuk mengatasi kebijakan dan kebijakan apa yang bisa diusulkan. Biasanya ditulis dalam 1000 (seribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) kata.
- d. Pernyataan kebijakan (policy statement). Bagian ini dapat memuat:
 - 1) tujuan kebijakan;
 - 2) profil kebijakan yang dibahas;
 - 3) aktor kunci kebijakan;
 - 4) alasan mengapa kebijakan akan mencapai sasaran.
 - 5) Pembahasan Di bagian ini dibahas tentang kekuatan dan kelemahan dari kebijakan serta alternatif pilihan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.
 - 6) Kesimpulan dan rekomendasi Merupakan kesimpulan dari isi policy paper, di bagian ini dapat dijelaskan juga keterbatasan kebijakan yang diusulkan dan berisi langkah-langkah yang harus diambil setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.
 - 7) Referensi Berisi daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan policy paper.
 - 8) Lampiran Lampiran-lampiran (jika memang ada).
 - 9) Biografi singkat penulis Merupakan bagian yang berisi tentang riwayat penulis mulai dari riwayat pendidikan, pengalamannya serta pengalaman tulisan sebelumnya.

B. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Pembangunan

Menurut Emile Durkheim (Theresia, 2015) “pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian pekerjaan”. Selanjutnya menurut Kartasmita (Satries, 2009) “Pembangunan seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan

peningkatan pendapatan ril perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya”.

2. Pemuda

Dalam Undang–Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa “pemuda adalah orang yang berusia 16 tahun sampai dengan usia 30 tahun”. Kemudian Pemuda menurut Abdillah (1974) adalah merupakan seorang laki- laki atau perempuan yang telah memasuki tahap dewasa, mayoritas kita mendapati bahwa pemuda ialah generasi penerus bangsa kemudian menjadi tumpuan dari negaranya. Di sisi lain dalam kehidupan lingkungan masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan (Satries 2009). Kemudian Menurut Taufik Abdullah (1974), mengemukakan bahwa :

pemuda atau generasi muda adalah konsep-konsep yang sering diberati oleh nilai-nilai. Hal ini terutama disebabkan kerana keduanya bukan lah semata-mata istilah ilmiah tetapi sering lebih merupakan pengertian ideologis atau kurturil. “Pemuda Harapan Bangsa” , “pemuda pemliki masa depan” atau “pemuda harus dibina” dan sebagainya, memperlihatkan betapa saratnya nilai yang telah terlekat pada kata “pemuda” tersebut. Hal ini telah umum disadari.

Menurut Mulyana dalam Taufik Abdullah (1974) mendefinisikan bahwa “pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil”. Sedangkan Menurut Koentjaraningrat dalam Taufik Abdullah (1974) masa muda/kepemudaan/pemuda adalah “suatu fase yang berada dalam siklus kehidupan manusia, dimana fase tersebut bisa kearah perkembangan atau perubahan”.

3. Pembangunan Pemuda

Terdapat beberapa model pembangunan pemuda menurut Hakim (Hakim and Qurbani 2021)

- a. AEC (*Adolescent Empowerment Model*). Model ini dikembangkan oleh Chinman & Linney yang berbasis pada disiplin ilmu psikologi tentang perkembangan remaja dan pemuda. Model pemberdayaan ini menyebutkan bahwa pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif. Kematangan mental ini berguna terutama dalam pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan ketrampilan, dan bekerjasama dalam aksi-aksi sosial.
- b. YD dan E (*Youth Development and Empowerment*) Model ini dikembangkan dengan Tujuan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam rangka pencegahan dari penyalahgunaan obat terlarang dan perilaku yang beresiko, agar pemuda melakukan hal yang bermakna dalam proyek pelayanan masyarakat. Kunci YD dan E adalah peningkatan hubungan sosial yang positif dan persiapan untuk partisipasi dan keterlibatan pemuda dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan publik. Prinsip utama dari YD dan E adalah pengakuan bahwa kaum muda adalah aset dan sumber daya harus dipanggil untuk berpartisipasi dalam komunitas dan juga isu-isu keuangan. Dalam proyek pelayanan masyarakat, menjadi peluang yang signifikan bagi pemuda untuk belajar keterampilan untuk bekerja, termasuk melibatkan proses konsultasi, 5 (lima) pertanggungjawaban, dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat.
- c. (TP) The Transactional Partnering Model ini berangkat dari studi tentang proses pendukung praktisi dewasa dengan peserta remaja dalam menilai masalah kualitas hidup mereka sendiri, yang mengembangkan tindakan yang terencana dan menerapkan solusinya. Diperkenalkan oleh Cargo et al, model ini dikonseptualisasikan sebagai proses transaksional kemitraan bersama antara masyarakat dan pemuda. Hal yang terpenting dalam proses ini di tangan masyarakat, khususnya orang dewasa yang dapat memberdayakan dan memfasilitasi para kaum muda sehingga memungkinkan mereka untuk secara bebas berkarya. Hal itu juga termasuk memastikan para pemuda memiliki keterampilan dan basis pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi untuk hadirnya perubahan dalam suatu komunitas. Upaya itu dapat dilakukan dengan tindakan fasilitasi oleh orang dewasa dalam mengajar, membimbing, dan menyediakan suatu umpan balik.

- d. The Empowerment Education Model (EE) Model ini berangkat pengembangan dan penerapan suatu teori tentang praktik sosial kritis dari program keaksaraan dari komunitas orang dewasa yang ada di Brasil. Model pemberdayaan ini berangkat dari suatu premis utama bahwa pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan adalah sebuah proses yang melibatkan dialog dan diskusi yang terbuka dan kritis, berikuti aksi yang reflektif. Dalam perkembangannya, pendekatan ini dikaitkan dengan teori perubahan perilaku perlindungan motivasi dan terbentuk model EE ini. Hasil dari EE ini secara khusus menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan pemuda menuju aksi sosial dan menghubungkan pemberdayaan individu dengan pengorganisasian masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang telah di tentuka sebelumnya dalam sebuah kebijakan. Adapun beberapa pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli, diantaranya:

- a. Menurut Abdul Wahab (Akib, 2010) mengemukakan bahwa implementasi adalah:

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

- b. Menurut Dunn (Akib, 2010) mengatakan bahwa *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical* (implementasi kebijakan pada hakekatnya merupakan kegiatan praktis, berbeda dengan perumusan kebijakan yang pada hakekatnya bersifat teoritis).

Dari beberapa pendapat ahli di atas mengenai implementasi kebijakan publik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses pencapaian tujuan kegiatan kebijakan publik yang telah di rumuskan dalam perumusan kebijakan.

5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Ada beberapa model implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2011), diantaranya adalah:

a. Model Merilee S. Grindle

Grindle mengemukakan model implementasi kebijakan pada tahun 1980. Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks dari implementasi kebijakan (*context of policy*).

Isi kebijakan (*content of policy*) menurut Grindle, yaitu:

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi.
- 2) Tipe manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai.
- 4) Letak pengambilan keputusan.
- 5) Siapa pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang digunakan.

Sedangkan implementasi kebijakan (*context of policy*), yaitu:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

b. Model Van Meter dan Van Horn

Pada model ini, mengandaikan bahwa implementasi kebijakan itu berjalan secara linear atau satu garis lurus dari keputusan politik, pelaksana atau implementator, dan juga kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dianggap memberi pengaruh kebijakan publik adalah:

- 1) Aktivitas pelaksana dan komunikasi antarorganisasi.
- 2) Karakteristik agen pelaksana/implementator.
- 3) Kondisi sosial, politik dan juga ekonomi.
- 4) Kecenderungan (*disposition*) para implementor selaku pelaksana.

6. Kebijakan Kota Makassar terkait Kepemudaan

Perda Kota Makassar No 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan di Kota Makassar yang menjadi pedoman oleh pelaksana kebijakan dalam pembangunan pemuda di Kota Makassar, sesuai pada pasal 3 pembangunan kepemudaan

bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas kreatif, inovatif, mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing. Selanjutnya secara rinci pada pasal 8 bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Kemudian pada pasal 17 yaitu:

1. Ayat 1 pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. Penyadaran
 - b. Pemberdayaan, dan
 - c. Pengembangan

Kemudian lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda dibahas pada pasal 22 yakni:

1. Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan kewirausahaan
 - b. Pengembangan kepemimpinan dan
 - c. Pengembangan kepeloporan

Selanjutnya pasal 23 yaitu:

1. Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah
2. Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Diselenggarakan melalui:
 - a. Pelatihan
 - b. Pemagangan
 - c. Pembimbingan
 - d. Pendampingan
 - e. Kemitraan
 - f. Promosi dan atau
 - g. Bantuan akses permodalan

Pembangunan pemuda khususnya pada Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam hal proses pemenuhan hak-hak pemuda yang tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh karena pemuda Kota Makassar dewasa ini masih tersandung banyak masalah kepemudaan mulai dari

perang kelompok hingga terbatas nya akses untuk mendapatkan bantuan modal usaha yang dapat menjadi potensi ekonomi Daerah. Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan mengambil sebuah kebijakan publik yang pro terhadap pemuda di Kota Makassar. Namun pada kenyatannya Perda Kota Makassar tersebut kurang maksimal dalam pengimplementasiannya. Hal ini dapat dilihat dari data peserta pelatihan berikut

Tabel 2
Jumlah Peserta Pelatihan

Pelatihan		Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Disabilitas	150
2.	Pelatihan Wirausaha	1000
3.	Pelatihan Iptek	150
4.	Workshop	150

Sumber: Data Primer 2022

Data di atas menunjukkan kurangnya atensi pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan karena dari sekitar 392.000 pemuda hanya dapat mencakup ±1450 pemuda yang berada di Kota Makassar.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan masalah dan teori yang diperoleh selama pra–penelitian serta landasan teori yang digunakana maka sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini peneliti menggunakan kerangka pikir yang berdasar pada teori implementasi kebijakan publik oleh Grindle yang memisahkan implementasi kebijakan menjadi dua yakni Isi kebijakan (*content of policy*) dan dan konteks implementasi (*context implementation*).

1. *Content of policy* atau isi kebijakan

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, adalah seperti apa kepentingan dari stakeholder kebijakan yang dimuat dalam isi

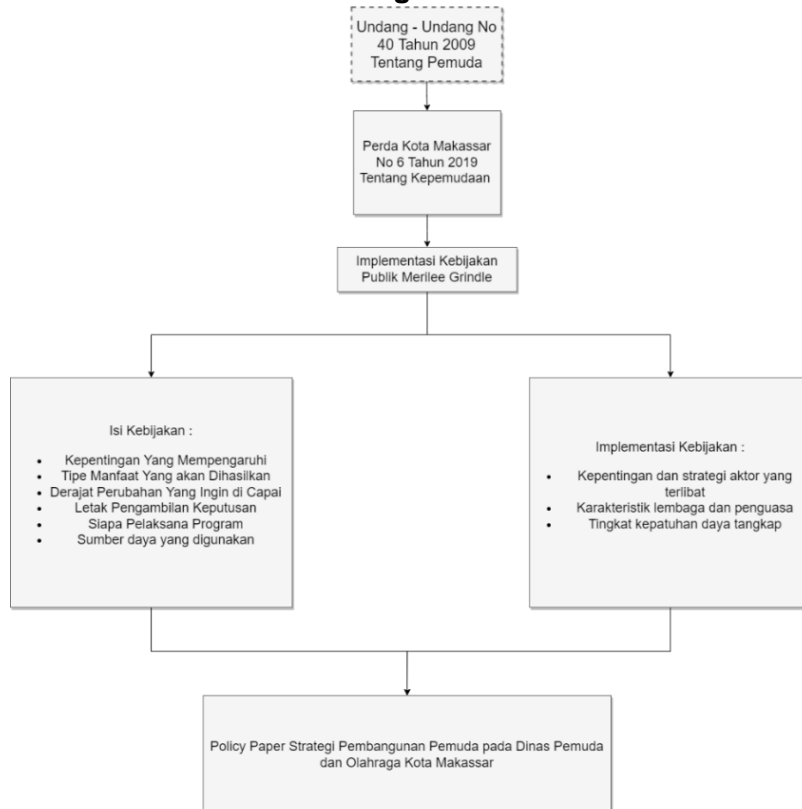
kebijakan. Dalam hal penelitian ini terdapat sejumlah stakeholder kebijakan seperti Pemuda Kota Makassar, Pelaku UMKM, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Sehingga hal inilah yang akan diteliti dilapangan.

- b. Jenis manfaat yang dihasilkan, pada sebuah kebijakan tentu terdapat manfaat yang dihasilkan, yaitu manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang telah di implementasikan dan manfaat apa yang diharapkan dari sebuah kebijakan tersebut.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan, yakni seberapa jauh perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, stakeholder kebijakan ini menginginkan perubahan apa yang ingin dicapai.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan, implementor kebijakan memegang peranan penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Oleh sebab itu dalam konteks penelitian ini perlu diketahui dan dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari pelaksana kebijakan.
- e. Pelaksana program, yaitu siapa saja aktor dari pelaksana kebijakan itu. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tentu perlu didukung implementor yang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang memadai demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. Sumber daya yang dikerahkan, yaitu pelaksana sebuah kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya operasional.

2. *Context implementation* atau konteks implementasi

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Hal ini perlu dilakukan dalam sebuah kebijakan guna melancarkan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari aktor pelaksana kebijakan, seperti apa strategi pelaksana kebijakan dalam pembangunan pemuda di Kota Makassar.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimana keadaan lembaga yang sedang berkuasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap, bagaimana kepatuhan dari kelompok sasaran terkait kebijakan. Apakah kelompok sasaran kebijakan ini paham terhadap aturan yang ada atau tidak. Bagi pelaksana kebijakan dapat dilihat dari daya tanggap atau respon dalam menanggapi suatu kebijakan. Dalam hal ini mengenai pembangunan pemuda di Kota Makassar, berikut kerangka pikir pada penelitian ini :

Gambar 3
Kerangka Pikir



Sumber: Data Primer, 2022

Pada penelitian yang telah dilakukan untuk menjabarkan setiap indikator peneliti telah mengelompokkan hasil wawancara yang telah didapatkan untuk menjadi pembahasan pada hasil penelitian ini, diantaranya isi kebijakan dan implementasi kebijakan.

1. Isi kebijakan

a. Kepentingan yang mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Dahyar selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dilaksanakan pada 27 September 2022, beliau menyatakan bahwa :

“dasar pembentukanya adalah Perda kota Makassar No 6 Tahun 2019 tentang kepemudaan dan merupakan tupoksi dari dinas pemuda dan Olahraga, lanjutnya sasaran dari program kebijakan pembangunan pemuda tentunya pemuda itu sendiri untuk peran dinas sendiri yaitu

sudah menjadi tupoksi dinas pemuda dan olahraga dalam membangun kepemudaan di kota Makassar.”

Sejalan dengan hal tersebut dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa memang benar peningkatan potensi pemuda sekarang membutuhkan pedoman dan dukungan yang masif oleh pemerintah selaku implementor kebijakan.

b. Tipe manfaat yang akan dihasilkan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama bapak Brahman Kepala Bidang Pengembangan Pemuda yang dilakukan pada 27 September 2022, beliau menyatakan bahwa:

”sampai saat ini kami telah melakukan berbagai macam pelatihan agar pemuda bisa mengembangkan potensi mereka”

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan tidak adanya manfaat dari program kebijakan pengembangan pemuda hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara Bersama beberapa pemuda di Kota Makassar yang serenteng menyatakan tidak mengetahui adanya program kebijakan pengembangan pemuda.

c. Derajat perubahan yang ingin di capai

untuk indikator derajat perubahan yang ini dicapai ditemukan dari hasil wawancara Bersama bapak Briyan selaku kepala bidang pengembangan pemuda, wawancara yang dilakukan pada 27 September 2022, beliau menyatakan bahwa:

“untuk Langkah khusus sendiri kami sudah melakukan awareness agar pemuda dapat mengetahui, untuk menangani masalah pada program ya sampai sekarang kami telah membuat banyak program untuk permasalahan pemuda, salah satunya adalah program pelatihan wirausaha 1000 pemuda Lorong, mengadakan jamboree pemuda dan event e-sport yang nilai ekonominya menjamin, untuk target sendiri kami sudah sesuai dengan renstra dan rpjmd yang telah ada.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bersama salah satu pemuda di kota Makassar yaitu nurhasmiati wawancara yang dilakukan pada 12 September, beliau menyatakan

“saya sendiri baru mengetahui adanya program kebijakan tersebut, namun bila adanya kebijakan pengembangan pemuda di kota Makassar sendiri baiknya dikenalkan di sebarluaskan agar para pemuda di kota Makassar khususnya saya sendiri menjadi lebih berpotensi di bidang masing-masing dan menciptakan pemuda yang produktif”.

d. Letak pengambilan keputusan

Berdasarkan wawancara telah dilakukan Bersama bapak brian selaku kepala bidang pengembangan pemuda yang dilakukan pada 27 September 2022, beliau menyatakan :

“Untuk hal ini belum ada kasus seperti itu”

Sejalan dengan hasil wawancara diatas ditemukannya juga pernyataan yang sama dari hasil wawancara Bersama Marwah yang dilakukan pada 15 September 2022.

“Saya belum menemukan pasar yang tepat dan modal saya tidak mencukupi”

Sehingga berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untu indikator letak pengambilan keputusan pada kebijakan ini perlu komunikasi dua arah yang lebih terarah.

e. Siapa Pelaksana Program

Berdasarkan wawancara Bersama bapak Dahyar selaku kepala bidang pemberdayaan pemuda di kota Makassar, beliau menyatakan bahwa :

“Mengenai kontribusi kami sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, Yaa karena sudah melalui proses rekrutmen yang ketat, tentu saja dalam prosesnya kami telah melakukan sesuai dengan prosedur dan juknis yang telah disusun Bersama.”

Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara yang didapatkan dengan saudari iin, beliau menyatakan:

“saya tidak tau bagaimana bentuknya tapi saya liat pemuda yang diperhatikan cuman sebagian”

f. Sumber daya yang digunakan

Untuk indikator ini dijelaskan dari hasil wawancara Bersama bapak Dahyar beliau menyatakan bahwa ;

“Untuk fasilitas sendiri, kami telah sediakan media sosial guna memberikan keterbukaan kepada pemuda terkait program kepemudaan, Saat ini kami menggunakan media sosial dan website sebagai media informasi dan wadah bagi pemuda yang mencari kegiatan pemudaan, Kami telah memiliki media sosial dan website resmi”.

Sehubung dengan hal tersebut bertimbal balik dengan hasil wawancara Bersama saudara Ari yang dilakukan wawancara pada 18 September 2022 beliau menyatakan bahwa :

“saya tidak tau”

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan belum maksimal karena hanya Sebagian yang dapat merasakannya.

2. Implementasi Kebijakan

a. Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak briyan ramadan selaku Kepentingan pengembangan, beliau menyatakan bahwa:

“Strategi kami saat ini adalah memasifkan awareness terhadap program-program kami kepada pemuda, Sejauh ini kami belum menemukan hal seperti itu, Tentu saja semua pihak memiliki tanggungjawab masing-masing”.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti strategi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sudah sangat bervariasi akan tetapi sambutan dari pemuda itu sendiri tidak sebanyak yang diharapkan.

b. Karakteristik Lembaga dan penguasa

Pernyataan yang dikeluarkan terkait karekteristik Lembaga berdasarkan wawancara Bersama dahyar, beliau menyatakan bahwa :

“Selama ini kami biasanya bekerja sama dengan NGO dalam membantu masyarakat”

Dibuktikan dengan hasil wawancara Bersama saudari Nurul pada 12 September, beliau menyatakan bahwa :

“memang ada Lembaga yang membantu, tapi bukan dari pemerintah “

c. Tingkat kepatuhan daya tangkap

Untuk indikator tingkat kepatuhan daya tangkap Bersama bapak dahyar, beliau menyatakan bahwa :

“Selama ini kami biasanya bekerja sama dengan NGO dalam membantu masyarakat, Tantangannya adalah sikap pemuda yang terlalu apatis terhadap upaya kami dalam membangun pemuda itu sendiri, Yaa dengan cara itu tadi kami memasifkan awareness terhadap program-program kami terhadap pemuda, Kami melakukan sosialisasi dengan skema mengundang masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.”